

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Selasa 31 Desember 2024
Wilayah	Kota Makassar



Realisasi Dana Desa Sulsel 95%

Realisasi Dana Desa Sulsel 95%

MAKASSAR, UPEKS- Realisasi penyaluran dana desa di Sulsel hingga akhir November 2024 mencapai Rp2,06 triliun lebih atau 95% dari total pagu. Realisasi ini mengalami peningkatan 8,71% apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat hanya Rp1,89 triliun.

"Realisasi dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan hingga November 2024 sangat baik, dimana sebagian besar daerah berhasil merealisasikan anggaran hampir sepenuhnya," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi, kemarin.

Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan wujud kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan desa dalam

mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. "Kami sangat apresiasi kinerja realisasi ini. Realisasi yang tinggi ini menunjukkan komitmen kuat dalam memanfaatkan dana desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," terang Supendi.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Banteng, Barru, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pinrang dan Soppeng berhasil merealisasikan dana desa 100%. Sedangkan Kabupaten Bone yang memiliki pagu tertinggi Rp293,85 miliar, mampu merealisasikan Rp287,79 miliar atau 97,94%. Sementara Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat realisasi terendah yaitu 95,73% dari pagu

Rp67,83 miliar.

Supendi mengungkapkan, kendala teknis dan administratif di beberapa daerah tetap menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. "Meski ada daerah dengan tingkat realisasi sedikit di bawah 100%, secara keseluruhan capaian ini sangat memuaskan. Kami akan terus mendampingi pemerintah daerah untuk memastikan realisasi di tahun berikutnya semakin baik," katanya.

Supendi menambahkan, hingga akhir November, terdapat tiga desa di Selayar yang alokasi dana desanya tidak salur. Kemudian satu desa di Kabupaten Bone tidak salur pada tahap dua. Dari dua tahap ini, tiga desa di Selayar sama sekali tidak

menyalurkan. Masing-masing yakni Desa Bonea dengan alokasi Rp692 juta, Desa Bongaya Rp800 juta, dan Desa Lamantu Rp906 juta.

"Kemudian Desa Jompie di Bone tahap satu tersalur, tahap duanya yang tidak tersalur sebesar Rp297 juta. Tidak tersalur karena APBDes sebagai persyaratan tidak terpenuhi. Karena Kepala Desanya tersangkut masalah hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya meminta semua daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja pemerintah, sehingga bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. **(eky/rif)**